



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) FAKSIMILE (021) 3500842; SITUS www.kemenkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 Moscow, Rusia, 15-16 Februari 2013

1. Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (MGM) G20 telah dilaksanakan di Moscow, Rusia pada tanggal 15-16 Februari 2013. Sebelum pelaksanaan MGM, dilakukan pula Pertemuan *G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors Deputies Meeting*, dan sejumlah pertemuan kelompok kerja G20 serta pertemuan yang digagas oleh lembaga kajian keuangan internasional. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, memimpin Delegasi RI (Delri) dalam Pertemuan MGM tersebut.
2. Presidensi Rusia telah menetapkan 8 (delapan) agenda prioritas pembahasan G20, yaitu: 1) *Framework for Strong, Sustainable and Balance Growth*, 2) *Jobs and Employment*, 3) *International Financial Architecture Reform*; 4) *Strengthening Financial regulation*; 5) *Energy and Sustainability*; 6) *Development for all*; 7) *Enhancing Multilateral Trade* dan 8) *Fighting Corruption*. Sebagian besar agenda tersebut menjadi agenda MGM. Hasil dan kesepakatan MGM akan menjadi dasar bagi kesepakatan dan komitmen negara-negara G20 yang akan dituangkan dalam *St. Petersburg Action Plan* untuk disahkan oleh Para Kepala Pemerintahan G20 dalam KTT G20 di kota Saint Petersburg, Rusia, tanggal 5-6 September 2013.
3. MBM mendiskusikan isu-isu utama penyelesaian krisis global (*downside risks in the global economy*), peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia (*the framework for strong, sustainable and balance growth, financing for investment*), stabilisasi keuangan internasional (*reform of the International Financial Architecture atau IFA dan financial regulation/financial inclusion*), dan pembangunan berkelanjutan (*energy and commodity*).
4. Dalam pertemuan MGM ini, **beberapa agenda dan kepentingan Indonesia di bidang pembiayaan bagi investasi jangka panjang (infrastruktur), penanganan utang luar negeri, keterwakilan yang setara pada pengambilan keputusan di Financial Stability Board (FSB), dan peningkatan kerjasama di bidang keuangan inklusif dapat diterima dan menjadi keputusan MGM. Para menteri dan gubernur bank sentral G20 sepakat**

menunjuk Indonesia dan Jerman untuk menjadi ketua bersama (co-chairs) study group pembiayaan untuk investasi jangka panjang. Tambahan pula, di sela pertemuan MGM dilakukan pula penandatanganan kerjasama di bidang kebijakan fiskal dan peningkatan kapasitas staff oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Australia.

5. Terkait perkembangan ekonomi global, ekonomi dunia saat ini masih belum sepenuhnya pulih dari krisis. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global, tingkat pengangguran yang masih tinggi di beberapa negara, ketidakpastian penyelesaian utang Eropa dan arah konsolidasi fiskal di Amerika serta belum pulihnya sistem intermediasi perbankan. Untuk mengatasi hal ini, G20 sepakat untuk melaksanakan program reformasi struktural untuk mendukung sistem keuangan publik yang berkelanjutan. Negara-negara maju akan melaksanakan program kebijakan fiskal jangka menengah (*medium-term fiscal plan*) secara kredibel, memelihara stabilitas harga di pasar domestik, dan meminimalisasi dampak rambat kebijakan negatif (*spillover*) ke negara lain. Selain itu, negara-negara yang memiliki ruang fiskal yang lebar diharapkan dapat menggunakan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
6. Untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi global, negara anggota G20 sepakat untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar fleksibel yang berdasar pasar (*market-based exchange rate system*). Selain itu, G20 menolak kebijakan devaluasi nilai tukar serta volatilitas nilai tukar yang berlebihan di pasar keuangan (*competitive devaluation*).
7. MGM juga membahas pentingnya ketersediaan pendanaan investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan permintaan domestik negara anggota G20. MGM juga menyambut baik laporan diagnostik yang disampaikan oleh Bank Dunia yang akan dijadikan sebagai dasar pembahasan isu pembiayaan infrastruktur ke depan. Beberapa instrumen keuangan seperti LCBM atau *Local Currency Bond Market* (pasar obligasi dengan nilai rupiah), pasar saham dan investor institutional perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pembiayaan infrastruktur ke depan.
8. Indonesia menyambut baik terbentuknya *Study Group Financing for Investment* . (*SG-FI*), dan **Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai co-chair bersama dengan Jerman untuk memimpin Study Group**. SG-FI akan berkolaborasi dengan World Bank, OECD, IMF, FSB, UN, UNCTAD dan beberapa organisasi internasional (IOs) lainnya untuk menentukan arah pembahasan dan pembiayaan infrastruktur ke depan. Indonesia dan Jerman melaporkan perkembangan SG-FI pada berbagai fórum MGM dengan puncaknya pada Leaders' Summit (KTT) di St Petersburg pada bulan September mendatang. Salah satu target dari SG-FI, bekerjasama dengan OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development), yang akan menjadi bagian kesepakatan KTT nantinya adalah Prinsip-Prinsip Utama Investasi Jangka Panjang dengan Pendanaan oleh para Institusi Investor (*High Level Principles of Long Term Investment Financing by Institutional Investors*).

9. OECD akan menyampaikan laporan analisis mengenai pengembangan instrumen alternatif pembiayaan dan insentif infrastruktur dan optimalisasi dana pensiun untuk mendukung pembiayaan infrastruktur jangka panjang. Sementara itu, FSB akan berperan sebagai lembaga yang akan memonitor dampak reformasi regulasi keuangan terhadap arus pendanaan investasi jangka panjang. MGM juga meminta MDBs (*Multilateral Development Banks* atau bank-bank pembangunan multilateral) untuk berperan sebagai katalis dalam memobilisasi dana pembiayaan infrastruktur diantaranya melalui *Public Private Partnership* (PPP), dan memberikan bantuan teknik khususnya pada persiapan proyek.
10. **MGM sepakat untuk terus meningkatkan transparansi pelaporan utang dan pinjaman sektor publik (*Government Borrowing and Public Debt Sustainability*).** Penanganan utang secara hati-hati dan sesuai batas kemampuan suatu negara diyakini akan meminimalkan risiko dari krisis keuangan. Selain itu, MGM akan melakukan proses monitoring dampak vulnerabilitas sektor keuangan terhadap utang sektor publik. Lebih lanjut, MGM meminta IMF dan World Bank untuk menyusun kerangka pedoman "*Guideline for Public Debt Management*".
11. MGM mendorong agar 2010 *IMF Quota and Governance Reform* dapat segera diselesaikan, dan menghimbau negara-negara yang belum melakukan ratifikasi untuk segera menyampaikan surat ratifikasi. Hingga saat ini baru sekitar 70% hak suara (vote) dari negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia, yang telah meratifikasi reformasi tata kelola dan hak suara IMF yang telah disepakati pada tahun 2010, dan masih dibutuhkan sekitar 15% hak suara tambahan untuk dapat direalisasikannya reformasi tersebut oleh IMF. Lebih lanjut, pembahasan *IMF Quota Review ke-15* berikutnya diharapkan dapat merefleksikan kekuatan ekonomi negara-negara di dunia yang didominasi oleh peningkatan GDP (*gross domestic product*) negara-negara berkembang. MGM berkomitmen mendorong kesepakatan IMF Quota Review ke-15 dapat dicapai paling lambat pada bulan Januari 2014.
12. MGM menyambut baik pendirian FSB sebagai entitas legal, dan diharapkan dengan status hukum baru tersebut FSB dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan dan implementasi kebijakan regulasi keuangan. FSB diharapkan segera melakukan evaluasi atas struktur keterwakilan para anggotanya yang saat ini belum merepresentasikan

kesetaraan diantara para anggotanya yang berasal dari negara-negara G20 seperti Indonesia, dan struktur keterwakilan diharapkan selesai paling lambat tahun 2014.

13. MGM mendukung implementasi kerangka kerja Basel III untuk meningkatkan struktur permodalan perbankan dan komparabilitas pengelolaan risiko asset (*risk-weighted assets*) yang dimiliki perbankan, dan FSB diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan rencana operasionalisasi penyelesaian penanganan SIFIs (*Systematically Important Financial Institutions*) paling lambat akhir bulan Juni 2013. MGM mengharapkan FSB dapat melaporkan penilaiannya atas penyelesaian permasalahan *too-big-to-fail* (perbankan skala besar dan global yang memiliki risiko tinggi) pada Leaders Summit di St Petersburg. MGM akan menyampaikan pula rekomendasi kebijakan atas pengawasan dan pengaturan hukum *shadow banking* pada KTT tersebut.
14. MGM menekankan pentingnya negara-negara di dunia menyelesaikan legislasi agar reformasi yang disepakati atas *over-the-counter (OTC)* pasar derivatif (*derivative market*) dapat diimplementasikan. Dengan telah terbentuknya komite pengawasan peraturan atas *Global Legal Entity Identifier (LEI)* pada bulan Januari 2013, MGM mengharapkan terealisasinya lembaga LEI pada bulan Maret mendatang untuk dapat dimulainya sistem LEI secara global.
15. MGM mendukung implementasi FSB *roadmap* untuk mengurangi ketergantungan kepada lembaga pemeringkat kredit (*FASB Principles for Reducing Reliance on Credit Rating Agency Ratings*). Selanjutnya, G20 meminta IOSCO untuk menyampaikan laporan analisis atas transparansi dan tata-kelola lembaga pemeringkat kredit.
16. MGM menekankan kembali dukungannya terhadap FATF untuk melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap negara-negara yang berisiko tinggi melalui *strategy Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML/CFT)*.
17. **MGM mendukung perkembangan yang disampaikan oleh *Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)* dalam implementasi *Financial Inclusion Action Plan*, dan mendukung GPFI untuk menyusun indikator finansial inklusif G20 bekerjasama dengan AFI, CGAP, IFC, OECD dan Bank Dunia.** MGM berkomitmen mendukung program *Financial Inclusion Peer Learning Program*, dan mendukung Bank Dunia dan lembaga internasional terkait untuk menyusun *Financial Inclusion Support Framework*. MGM mendukung sepenuhnya peningkatan akses keuangan bagi wanita dan pemuda (*youth*), serta mendukung OECD dan Bank Dunia untuk menyusun sistem pengukuran *financial literacy* dan evaluasi program edukasi keuangan inklusif secara komprehensif.

18. MGM mendukung peningkatan proses transparansi harga komoditas dan energi, dan meminta IEA, IEF, dan OPEC untuk menerbitkan laporan terkait usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara anggota untuk meningkatkan transparansi harga batubara dan gas. MGM juga menyambut baik rekomendasi *International Energy Forum* (IEF) untuk meningkatkan keandalan database JODI (*Joint Organization Data Initiative*) Oil dan JODI-Gas. Database JODI-Gas diharapkan akan dapat terealisasi pada tahun 2013.
19. MGM mendukung penyampaian laporan secara sukarela dari setiap negara anggota atas penggabungan kebijakan ekonomi hijau (*green growth*) dan pembangunan berkelanjutan pada agenda reformasi struktural G20. MGM akan melaporkan ke Leaders Summit kemajuan yang telah dilakukan negara anggota untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan-bakar fosil melalui pengurangan subsidi dan pemberian dukungan bagi kalangan kurang mampu atas dampak pengurangan subsidi. Lebih lanjut, MGM melanjutkan kerjasama berkenaan dengan pembiayaan perubahan iklim (*climate finance*) melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan tujuan dan prinsip UNFCCC.
20. Disela pertemuan G20, **Indonesia dan Australia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) Between the Australian Treasury and Kementerian Keuangan Indonesia***. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Australia. Penandatanganan Memorandum tersebut yang juga disaksikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus tersebut, berisikan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama berkesinambungan kedua kementerian melalui penyelenggaraan dialog ekonomi secara periodik dan pertukaran program kegiatan dan pandangan di bidang fiskal, kerjasama ekonomi, ekonomi internasional, kebijakan perpajakan, keuangan dan perubahan iklim. Menteri Keuangan Martowardojo melakukan pertemuan bilateral terpisah dengan *Under Secretary* Ms. Lael Brainard, dan membahas agenda G20 terkait pembiayaan infrastruktur, regulasi sistem keuangan global, dan kerjasama bilateral ke dua negara di bidang ekonomi dan keuangan.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Telp. (021) 34831678
Faks. (021) 34831677